



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRJADI PRAPTO SUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021)3449230 PSW 5203, 5216, (021)3846322; FAKSIMILE (021) 34434814
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-442d/PB.1/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penawaran Beasiswa Pendidikan Indonesia
Afirmasi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

24 Mei 2018

- Yth. 1. Para Direktur
2. Para Kepala Kantor Wilayah
3. Para Kepala Bagian lingkup Sekretariat
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusdiklat PSDM) Nomor S-611/PP.2/2018 tanggal 21 Mei 2018 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa Kepala Pusdiklat PSDM menginformasikan penawaran Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Afirmasi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Terkait penawaran tersebut, dimohon bantuan Saudara agar menginformasikan kepada seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan pada lingkup unit masing-masing. Dalam pengusulan calon peserta, diharapkan dapat memperhatikan komposisi SDM pada unit masing-masing baik dari sisi kualitas maupun kuantitas demi menjaga harmonisasi dan keselarasan antara pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari.

Usulan calon peserta dan berkas kelengkapan diterima Bagian Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 5 Juni 2018 Pukul 17.00 WIB untuk program beasiswa dalam negeri dan tanggal 17 September 2018 Pukul 17.00 WIB untuk program beasiswa luar negeri dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir. Informasi lebih lanjut terkait beasiswa dimaksud, dapat menghubungi Bagian SDM Sekretariat DJPB (Narahubung: Dedi Supriadi, telepon 021-3846322).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPOTOSUHARDJO I LANTAI II

JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710

TELEPON (021) 3449230 PSW 5216,5217, (021) 3846322

SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

FORMULIR IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

UNTUK PROGRAM IN HOUSE TRAINING (IHT) TAHUN 2018

Unit Kerja : Kanwil DJPb Provinsi Aceh

No.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ INISIATIF STRATEGIS/ IKU UNIT MASING-MASING	KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN
1	Implementasi Program Perbendaharaan Menulis	Pelatihan Writing Skill bagi pejabat KPPN dan seluruh pelaksana
2	Pelaksanaan Kehumasan Instansi Vertikal	Pelatihan fotografi, pembuatan video, desain grafis dalam rangka peliputan kegiatan dan penyusunan infografis capaian kinerja
3	Pelaksanaan Kehumasan Instansi Vertikal	Pelatihan public speaking kepada <i>stakeholders</i> masyarakat umum dan civitas akademik
4	Penyaluran Kredit Usaha Rakyat / Ultra Mikro	Pelatihan pengelolaan keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5		

Banda Aceh, 26 Maret 2018

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah

Pth



Halim
NIP 197005201997031001

A. Program Yang Ditawarkan

Field of Study	Lokasi	
	Dalam Negeri	Luar Negeri
Ekonomi dan Bisnis	Magister Ilmu Ekonomi	Master of Accounting
	Magister Akuntansi	Master of Economics
	Magister Manajemen	Master of Economics and Business
	Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan	Ph.D in Accounting
Hukum	-	Ph. D in Economics
	Magister Hukum	Master of Law
	Doktor Hukum	-
Ilmu Sosial	Magister Ilmu Komunikasi	Master of Business Administration
	Magister Kebijakan Publik	Master of Public Administration
	-	Master of Public Policy
	-	Ph.D in Public Policy
Teknologi Informasi	Magister Ilmu Komputer	Master of Information Technology
	Magister Teknologi Informasi	-
Keuangan	Magister Manajemen Keuangan	Master of Financial Management
	-	Master of Public Finance
	-	Master of Applied Finance
	-	Master of Financial Planner
	-	Master of Management
	-	Ph.D in Financial Management
MIPA	-	Master of Statistics (Econometric)

*) Berdasarkan HCDP Ditjen Perbendaharaan Periode 2018-2023

B. Persyaratan

Selain memenuhi persyaratan yang diatur oleh LPDP, calon peserta juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan dan persyaratan yang ditentukan oleh pemberi beasiswa yaitu sebagai berikut;

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kerja minimum 2 (dua) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
2. Usia tidak lebih dari 40 tahun 0 hari untuk pendaftar program magister atau tidak lebih dari 42 tahun 0 hari untuk pendaftar program doktoral per tanggal 21 September 2018;
3. Pangkat minimum adalah Penata Muda (III/a) untuk pendaftar program magister atau Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk pendaftar program doktoral;
4. Memiliki ijazah S1/D-IV yang diakui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau ijazah D-IV PKN-STAN untuk pendaftar program magister atau memiliki ijazah S2 untuk pendaftar program doktoral;
5. Memiliki masa kerja 2 (dua) tahun sejak selesai mengikuti program tugas belajar sebelumnya (dihitung dari tanggal kelulusan sebagaimana tercantum pada ijazah sampai dengan tanggal 21 September 2018);
6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, ataupun tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku;
7. Tidak sedang dicalonkan untuk memperoleh beasiswa pada program lain, tidak memiliki ijazah S2, ataupun tidak sedang mengikuti pendidikan S2 serta bersedia untuk tidak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

Gedung Keuangan Negara Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh
Telp : 0651-31070 Fax.: 0651-31094 email: kepeg.kanwil01@gmail.com

NOTULENSI MORNING CALL
HARI SELASA TANGGAL 27 MARET 2018
PUKUL 07.30

Pemaparan Informasi dari Bapak Samsul Bahri

- Terdapat permintaan usulan nama pejabat eselon IV untuk ditunjuk sebagai Duta Transformasi Kelembagaan Tingkat Kementerian Keuangan.
- Seiring dengan semangat perubahan, mari kita ^{dalam}ubah penampilan kita agar lebih baik.
- Diusulkan agar ^{dalam}morning call ada snack & kopi sekali sebulan.
- Para pegawai agar merekam IKU Kontrak Kinerja dalam e-perfomance.
- Apabilah tidak memiliki tugas tambahan, mari kita dukung pegawai lain dalam melaksanakan tugas tambahannya.
- Mari kita tingkatkan Integritas kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan.

Pemaparan Informasi dari Sdri. Dirsya Febinisa :

- Tugas dan fungsi dari Bidang PPA II :
 - 1). Menyusun KFR (Kajian Fiskal Regional) yang merupakan potret pelaksanaan anggaran daerah dan ekonomi. Disusun secara tahunan dan triwulan.
 - 2). Profil Keuangan Daerah, yang merupakan potret pelaksanaan anggaran daerah.
 - 3). Monitoring kredit program (KUR/UMI)
 - 4). Menyusun Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) dan Laporan Rekapitulasi Transfer (LRT).
 - 5). ~~M~~enyelenggaran FGD ^{untuk} membahas isu-isu fiskal dan kebijakan pemerintah.
 - 6). Rekonsiliasi outstanding pinjaman melalui aplikasi SLIM.

Arahan dari Pak Halim selaku Plh. Kepala Kanwil :

- 1). Semoga kita semakin semangat dalam bertugas.
- 2). Bagi yang belum mengisi dan mengupload SPT, LP2P, dan IKU, agar segera mengisi.

Notulis

Barry Dharmawan
NIP 198501152006021003

- akan mendaftarkan diri untuk mengikuti perkuliahan program pascasarjana selain Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Afirmasi (LPDP);
8. Direkomendasikan oleh atasan langsung setingkat eselon III, bahwa calon peserta berpotensi untuk dikembangkan sebagai karyasiswa program pascasarjana;
 9. Tidak sedang dalam proses kepindahan ke unit organisasi lain;
 10. Memiliki Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 11. Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter pemerintah yang diperoleh setelah tanggal 21 Maret 2018.

C. Tata Cara Pendaftaran

1. Calon peserta dapat langsung melakukan pendaftaran secara daring melalui situs LPDP <https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id>.
2. Setelah melaksanakan pendaftaran seperti pada poin 1 (satu) diatas, calon peserta wajib menyampaikan dokumen persyaratan pendaftaran kepada pengelola kepegawaian unit eselon II masing-masing sebagai berikut:
 - a. Formulir aplikasi beasiswa yang telah diisi lengkap oleh calon peserta (Lampiran II);
 - b. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang di kantor masing-masing (ijazah dan transkrip D-III dan SI/D-IV untuk pendaftar program magister, sedangkan untuk pendaftar program doktoral ditambah ijazah dan transkrip S2);
 - c. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS terakhir;
 - d. Asli surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin (Lampiran III);
 - e. Asli surat pernyataan tidak sedang dicalonkan untuk memperoleh program beasiswa lainnya, tidak memiliki ijazah S2/S3, ataupun tidak sedang mengikuti pendidikan S2/S3 bermaterai (Lampiran IV);
 - f. Asli surat rekomendasi atasan langsung setingkat eselon III (Lampiran V);
 - g. Fotokopi PPKP 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang diperoleh setelah tanggal 21 Maret 2018;
 - i. Fotokopi bukti registrasi/pendaftaran melalui situs LPDP sebagaimana pada poin 1 (satu).
3. Pegawai yang pernah mendaftarkan diri pada Program Beasiswa Kementerian Keuangan Tahun 2018 dan telah dinyatakan lulus verifikasi dokumen dapat mengikuti program beasiswa ini dengan tetap melakukan pendaftaran sebagaimana pada poin 1 (satu) dan menyampaikan dokumen persyaratan berupa fotokopi bukti registrasi/pendaftaran melalui situs LPDP.
4. Usulan calon peserta seleksi beasiswa dan lampiran dokumen persyaratan diajukan secara kolektif melalui unit eselon II masing-masing kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan c.q. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia. Usulan yang tidak melalui unit eselon II tidak akan diproses lebih lanjut.
5. Untuk calon peserta dari unit eselon III lingkup Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, harus diajukan secara kolektif melalui unit eselon III. Nota Dinas usulan ditetapkan oleh kepala bagian dan dikirimkan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.
6. Perekaman data calon peserta secara daring dilaksanakan sebelum mengirimkan berasa pendaftaran (*hardcopy*).
 - a. Perekaman data calon peserta dilakukan secara daring melalui aplikasi *training* di alamat <http://172.16.2.112/> mulai tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran. Proses perekaman daring dilakukan oleh:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

Gedung Keuangan Negara A Lt. 2 Jln. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh-23241
Telepon (0651) 31070 Faksimile (0651) 31094 Website: www.aceh-djpbn.org

ABSENSI
MORNING CALL" ONE DAY ONE INFORMATION

HARI : Selasa
TANGGAL : 27 Maret 2018
Penyaji : Samsul Bahri

No.	Nama	NIP	Tanda Tangan
1	Fathurrahman	060065724	
2	Muchlis	19620216198503102	
3	BASRON	19630715198503106	
4	Rosmaini	196409161985032003	
5	Rosmawati	196705042005072001	
6	Kurniawan	19740307198503000	R
7	GUNTUR KARISMA P.	19921129201411001	
8	ARRIZA ADIYAH	199012200017021002	
9	Hamengkudu T.P.	199106292013101002	
10	Pery Hardi	199202162013101002	
11	Fauzi Idusam	19830810200411001	
12	Alfan Afandi	199004012013101001	
13	Muhammad .	06071985 .	
14	Ali	060113968	
15	Suciati	060096711	
16	Ibrahem		
17	Risan Gusanto	060098712	
18	Nurjanah	060072626	
19	Alawiyah	060096713	
20	Mahy Pdgi	-	
21	Barry D.	060113672	
22			

1. Subbag Kepegawaian pada masing-masing Kanwil, untuk lingkup Kanwil dan KPPN;
 2. Subbag Tata Usaha pada masing-masing Direktorat, untuk lingkup Direktorat di Kantor Pusat;
 3. Bagian Sumber Daya Manusia untuk lingkup Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.
- b. Para penanggungjawab perekaman daring tersebut (pengelola kepegawaian) wajib melaksanakan verifikasi secara teliti dan memadai atas seluruh berkas persyaratan calon peserta sebelum diusulkan.
- c. Manual Pendaftaran terdapat di alamat <http://172.16.2.112/>.
- d. Dalam proses perekaman daring melalui aplikasi *training*, dilakukan juga pengunggahan hasil *scan* surat usulan peserta berikut dokumen pendukungnya.
- e. Proses perekaman tidak menggugurkan kewajiban pengiriman *hardcopy* pendaftaran unit eselon II bersangkutan kepada Bagian Sumber Daya Manusia.
7. Berkas pendaftaran calon peserta dikirimkan secara kolektif melalui unit eselon II masing-masing kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana pengiriman tercepat selambat-lambatnya pada tanggal penutupan pendaftaran ke alamat:

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
 d/a Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Bagian Sumber Daya Manusia
 Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Lantai 2,
 Jl. Lapangan Banteng Timur I No. 2-4, Jakarta Pusat 10710

D. Proses Seleksi

1. Ditjen Perbendaharaan akan melakukan seleksi administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan.
2. Panitia seleksi administratif DJPb tidak menerima berkas susulan yang dikirimkan setelah tanggal batas akhir waktu pendaftaran.
3. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan, berkas aplikasi pendaftarannya akan diteruskan kepada Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM.
4. Pusdiklat PSDM selanjutnya akan menerbitkan surat rekomendasi pencalonan bagi para peserta seleksi Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Afirmasi LPDP, lingkup Kementerian Keuangan.

E. Jadwal Pendaftaran dan Tanggal-tanggal Penting (Key Dates)

No.	Kegiatan	Jadwal Kegiatan	
		Program Dalam Negeri	Program Luar Negeri
1.	Pembukaan penawaran beasiswa	25 Mei – 5 Juni 2018	25 Mei – 17 September 2018
2	Perekaman calon peserta pada aplikasi <i>training</i>	25 Mei – 5 Juni 2018	25 Mei – 17 September 2018
3	Tanggal penutupan pendaftaran	5 Juni 2018 Pukul 17.00 WIB	17 September 2018 Pukul 17.00 WIB
4	Seleksi Administratif Internal DJPb	6 – 8 Juni 2018	18 – 21 September 2018
5	Pengumuman seleksi administrasi internal Ditjen Perbendaharaan dan penyampaian berkas pendukung pendaftaran ke Pusdiklat Pengembangan SDM, BPPK	8 Juni 2018	21 September 2018

Wajibatan

- Berdasarkan ~~executive~~ training yang baru saya ikuti, terdapat perubahan jumlah soft competency pegawai yang semula berjumlah 35 menjadi 23 ~~Kompetency~~ kompetensi
- Soft competency yang dibutuhkan nantinya, akan berbeda-beda untuk tiap-tiap jabatan. Hal ini nantinya akan disosialisasikan kepada para pejabat eselon III wajib coaching.
- Subbag Kepegawaian agar mengelompokkan nama-nama pejabat ke dalam jenis-jenis soft competency yang masih memerlukan pengembangan untuk selanjutnya diberikan penugasan-penugasan terkait soft competency.
- Para pejabat agar mempersiapkan diri untuk peningkatan pengembangan soft competency ini.

Notulis

Barry Dharmawan
NIP 198501152006021003

F. Lain-lain

1. Panitia seleksi administratif DJPb maupun Panitia seleksi Pusdiklat PSDM memiliki kewenangan untuk membatalkan kelulusan calon peserta apabila ternyata di kemudian hari ditemukan informasi yang tidak benar. Segala biaya yang sudah dikeluarkan akan dibebankan kepada yang bersangkutan melalui Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Keputusan Panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.
2. Informasi lebih lanjut terkait proses seleksi administratif dapat menghubungi Sdr. Dedi Supriadi Bagian Sumber Daya Manusia melalui telepon di nomor (021) 3846322 sedangkan informasi mengenai proses seleksi beasiswa pada LPDP dapat merujuk pada situs <https://www.lpdpt.kemenkeu.go.id/>.



Alpin

Morning Call Tanggal 3 April 2018

Per-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kanwil DJPb

• Menggantikan Per-41/PB/2013

Laporan Keuangan Pemerintah Keuangan Konsolidasian adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah dalam satu periode.

Laporan Tersebut terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah adalah laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah di wilayah kerja Kanwil DJPb berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti sistem neraca nasional (System of National Accounts – SNA), Manual Neraca Pembayaran (The Balance of Payments Manual),(Manual Statistik Moneter dan The Monetary and Financial Statistics Manual).